



Membangun Iklim Dunia Usaha Riau Kondusif & Kompetitif

LAPORAN TAHUNAN 2019



**MENGOPTIMALKAN PELUANG
DENGAN MEMAKSIMALKAN
DAYA JUANG MENUJU RIAU
CEMERLANG**

Member of:



**DEWAN PIMPINAN PROVINSI RIAU
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
THE EMPLOYERS' ASSOCIATION OF INDONESIA**





VISI

**TERCIPTANYA IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF DAN KOMPETITIF**

MISI

- 1. MENGEMBANGKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN PRODUKTIF**
- 2. MELINDUNGI, MEMBELA DAN MEMBERDAYAKAN SELURUH PELAKU USAHA**
- 3. BERPERAN AKTIF DALAM MENINGKATKAN INVESTASI**
- 4. BERPERAN AKTIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU

PESAN KETUA UMUM DPN APINDO MENYAMBUT 2020

SUBSTANSI FOKUS OUTLOOK APINDO 2020

PENDAHULUAN	1
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	7
1. AKTIFITAS INTERNAL	8
a. Konsolidasi dengan DPK	8
b. Menghadiri Acara DPK	6
c. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi	9
d. Pertemuan-pertemuan dengan Members/ Stakeholder	10
e. Menyikapi Regulasi	11
f. Fasilitator Perundingan	12
g. Penerbitan Dokumen	13
2. AKTIFITAS PROGRAM KEMITRAAN.....	14
3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN	15
a. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah	15
b. Kegiatan Tingkat Nasional	23
c. Kegiatan Tingkat Regional	24
4. SEBAGAI NARASUMBER	24
5. SEBAGAI ANGGOTA TIM	25
a. Dewan Pengupahan	25
b. LKS Tripartit	26
c. Pengurus BKSP Riau	26
d. Tim Juri Penghargaan Paritrana 2019 BPJS Ketenagakerjaan Riau..	26
e. Tim Penyusunan KLHS RPJMD Riau 2019 – 2024	26
f. Pengurus Forum Komunikasi Jasa Permagangan Riau	27
KEANGGOTAAN	28
TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN	29
1. DASAR HUKUM DEWAN PENGUPAHAN	29
2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU	29
3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR MIGAS	30

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA	32
1. KONDISI DPK SE RIAU	32
2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK	32
3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK	34
4. KEGITAN DPK APAINDO RIAU	34
 APINDO TRAINING CENTER	 41
 POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2020	 43
 PENUTUP	 44

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU



Tahun 2019 boleh dikatakan sebagai tahun istimewa bagi APINDO Riau, khususnya di penghujung tahun. Mengapa demikian? Ya, tahun 2019 APINDO Riau seperti mendapat satu momentum besar untuk tumbuh dan berkembang membumi di tanah Melayu Riau tercinta ini.

Perjalanan sepanjang tahun 2019 merupakan sebuah proses pembelajaran penting bagi kami. Pada tahun tersebut tugas kami mengawal dunia usaha Riau harus kami jalankan dengan satu prinsip "*cermat dan bijak dalam bersikap*". Prinsip ini mampu menghantarkan kami pada satu langkah besar untuk membawa APINDO Riau menjadi organisasi pengusaha yang diperhatikan dan diperhitungkan. Kesabaran dan stamina follow up tanpa menyerah membuahkan hasil, sebuah Surat Edaran Gubernur Riau No. 184/SE/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Keanggotaan APINDO Provinsi Riau.

Secara nasional DPP APINDO Riau merupakan DPP ke-3 di Indonesia setelah Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau yang mendapatkan dukungan sejenis dalam hal keanggotaan dari gubernur. Ini penting sebagai stimulus keberlanjutan organisasi kedepan dalam membangun dunia usaha yang kondusif di Riau. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Riau Bapak. Drs. H. Syamsuar, M.Si yang telah memberikan respon positif serta dukungan kepada APINDO Riau. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau kami juga menyampaikan terima kasih dengan memberikan tindak lanjut cepat kepada satuan kerja dinas tenaga kerja di kabupaten/ kota untuk menjalankan instruksi dalam Surat Edaran Gubernur Riau tersebut.

Surat ini merupakan kado akhir tahun bagi APINDO Riau yang secara signifikan membawa trickle down effect kepada DPK APINDO di Kabupaten/ Kota. Namun demikian kami masih punya tugas untuk tetap terimplementasikannya nota Gubernur Riau ini pada seluruh tingkatan instansi pemerintah daerah.

Perlu kami sampaikan kepada dunia usaha Riau terlepas dari members atau bukan members APINDO Riau, bahwa keberadaan APINDO merupakan sebuah ruang terbuka bagi pelaku usaha untuk menjaga kondusivitas bisnis yang dijalankan. Surat Edaran Gubernur

yang kami terima tidak berarti akan melemahkan sikap kritis dan semangat juang kami membela pelaku usaha terutama dalam menghadapi regulasi. Kami selalu menghimbau pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan-keluhan dalam menjalankan usaha untuk kami bisa ikut serta memberikan dukungan secara maksimal sebagaimana hal-hal yang pernah kami perjuangkan sebelumnya.

Tantangan APINDO Riau pada tahun 2019 lalu terutama dalam memperjuangkan kenaikan UMK penuh dinamika. Secara tim kami sangat solid untuk berjuang pada titik kenaikan kewajaran sesuai masukan dari pelaku usaha Riau. Dengan tidak bermaksud mengenyampingkan regulasi yang ada, kami dengan segala pertimbangan memutuskan angka kenaikan terbatas pada beberapa Kabupaten/ Kota yaitu Kab. Siak, Kab. Bengkalis, dan Kota Dumai untuk menjaga stabilitas dunia usaha setempat. Ini penting mengingat 3 Kab./Kota ini memiliki UMK yang berada pada 3 besar di Riau. Pada kondisi ekonomi saat ini yang masih belum membaik, kenaikan sesuai regulasi kami nilai dapat berefek negatif bagi aktifitas operasional perusahaan dan keberlangsungan pekerja dalam memperoleh pendapatan sebagai karyawan perusahaan.

Secara ringkas, DPP APINDO dan tim pengupahan Kabupaten/ Kota berupaya berjuang dalam forum perundingan, dan berhasil. Namun dalam perjalanan penetapan, dengan segala pertimbangan penting Gubernur meminta agar besaran kenaikan UMK mengacu kepada ketentuan yang ada dan pada akhirnya gelombang perubahan tidak bisa kami hindari. Surat Keputusan Gubernur Riau menetapkan kenaikan UMP dan UMK pada tahun 2019 secara keseluruhan Kab./Kota berlaku pada angka 8,51%.

Inilah satu situasi yang sudah berlaku, namun perjuangan DPP APINDO Riau belum usai karena masih ada tugas yang diberikan pemerintah kepada kami, yaitu perundingan penetapan kenaikan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Sektor Migas. Ini akan menjadi langkah perjuangan yang cukup berat mengingat nilai kenaikan UMSP berpatokan pada besaran kenaikan UMK tertinggi. Khususnya pelaku usaha sektor migas yang sampai saat ini masih pada posisi bertahan sebagaimana perusahaan CPO, sangat berharap kenaikan UMSP tidak menjadi beban berat bagi operasional perusahaan. Harapan ini realistis mengingat harga minyak dunia menurun sejak 2018 lalu yang berimbas pada lemahnya industri migas nasional.

Selanjutnya menyikapi Riau saat ini, dalam pendahuluan laporan ini kami mengambil 5 point besar yang kami pandang perlu untuk kami berikan catatan-catatan penting. Adapun 5 hal tersebut yaitu APBD

Riau, CPO Riau, Blok Rokan, Jalan Tol Riau, dan Karhutla. Pandangan singkat kami tentang 5 hal tersebut tentunya hanya pada sebatas mengingatkan dan memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang ada untuk sebesar-besar kemajuan ekonomi Riau. Kami siap menjadi mitra dalam membenahi hal-hal yang kami pandang krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi Riau ke depan.

Annual Report 2019 ini kami mengusung thema *Mengoptimalkan Peluang dengan Memaksimalkan Daya Juang Menuju Riau Cemerlang*. Tersirat dalam thema ini yaitu bahwa potensi ekonomi handalan Riau yang saat ini terpuruk harus bangkit kembali karena harapan selalu ada. Untuk itu segenap komponen dibawah naungan pemerintah daerah harus berjuang maksimal agar potensi ini kembali bangkit dan membawa kemajuan bagi Riau.

Buku ini menyampaikan sejumlah aktifitas DPP APINDO Riau selama tahun 2019 dalam tugas dan tanggung jawab menjaga kondusivitas dunia usaha Riau. Kepada members, rekan sesama pengurus DPP, DPK dan mitra kerja kami baik instansi pemerintah maupun swasta, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Dan izinkan pula kami menyampaikan maaf sekiranya dalam setahun berlalu masih terdapat kekurangan dan tugas yang belum terlaksana dengan baik.

Salam sukses untuk semua dunia usaha Riau. Maju Dunia Usaha, Maju Negeri

*Berlayar ke pulau membelah gelombang
Perahu berlabuh dipetang hari
APINDO Riau tak kan berhenti berjuang
Mengawal dunia usaha memajukan negeri*

Pekanbaru, Januari 2020

DPP APINDO Riau

**WIJATMOKO RAH TRISNO
KETUA**

PENDAHULUAN

Membaca Riau dalam angka pada tahun 2019 lalu memberi kita beberapa perspektif sebagai suatu kesimpulan bagaimana ekonomi Riau yang berlalu dan bagaimana pula outlook ekonomi Riau tahun 2020. Ada kegelisahan yang masih menggantung dan ada juga ada untaian harapan yang ingin segera diwujudkan.

Mereview ekonomi makro Riau yang telah berlalu pada 2019, kita akan menemukan sejumlah catatan dengan satu kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi makro Riau belum sebagaimana harapan. Pertumbuhan ekonomi kita masih rendah bahkan sampai periode triwulan III 2019 angka pertumbuhan ekonomi Riau masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,49%) dan nasional (5,04%). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan PDRB (yoy) Regional Sumatera Kuartal III 2019, PDRB Riau tercatat hanya 2,74% berada pada ranking terakhir di bawah Provinsi Kep. Bangka Belitung 3,05% dari 10 provinsi di Sumatera.

Dalam kajian diskusi ekonomi Riau yang diselenggarakan BI Provinsi Riau, Kepala Kantor Perwakilan BI Riau menyampaikan bahwa rendahnya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau disebabkan oleh faktor :

1. sisi konsumsi pemerintah yang salah satunya dipicu oleh penurunan APBD Riau 2019.
2. sisi dunia usaha, yakni disektor industri pengolahan, konstruksi, dan masih berlanjutnya kontraksi pertambangan akibat *natural declining*.
3. Sisi konsumsi rumah tangga dimana tidak adanya kenaikan pendapatan sehingga menurunkan daya beli akibat inflasi harga.

Mencoba memahami tiga hal ini secara dalam dan komprehensif, kami APINDO Riau melihat satu ruang diskusi sebagai *sharing* pemikiran bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau sangat besar dipengaruhi kebijakan strategis pemerintah baik internal pemerintahan terkait APBD dan melemahnya daya dukung dunia usaha dalam aktifitas ekspor sebagai akibat efek global market yang masih fluktuatif. Hambatan ekspor CPO disebabkan hambatan tarif sebesar 8 – 18% atas impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa, dan hambatan non tarif diantaranya kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II baru Uni Eropa serta *black campaign* tentang CPO.

Sebagai lembaga yang membidangi dunia usaha, maka kami APINDO Riau ingin memberikan respon sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kami kepada Pemerintah Bumi Lancang Kuning ini agar ke depan menjadi negeri yang lebih

produktif dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik. Catatan kami ini tentunya kami ulas melalui satu pemikiran bersama dalam pembahasan secara makro berdasarkan report ekonomi dari lembaga-lembaga terpercaya dan melihat pada realita perkembangan dunia usaha terkini. Inilah 6 point isu strategis yang kami angkat sebagai pandangan kami dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Riau.

Pertama, melihat pada performa APBD dan pertumbuhan ekonomi Riau. APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi. Hal ini karena APBD berfungsi sebagai instrumen perencanaan, otorisasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan pembangunan daerah. Melihat kebelakang realisasi APBD Riau dari sisi keuangan sejak tahun 2016 – 2018 cukup tinggi mencapai diatas 80%, bahkan pada tahun 2019 dengan APBD yang disahkan sebesar Rp. 9,4 T realisasi keuangan mencapai 88% dengan realisasi fisik 93%. Kami dari APINDO Riau mengapresiasi capaian ini sebagai kinerja positif Pemprov Riau dalam pembangunan daerah. Mengutip Laporan Bank Indonesia Provinsi Riau, pada sisi pendapatan APBD Riau 2019 ditopang oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat adanya pembayaran dana tunda salur DBH 2017 dari pemerintah pusat. Namun pada sisi lain pertumbuhan ekonomi kita hanya berada pada angka 2,74% dimana angka ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera dibawah Provinsi Bangka Belitung (3,49%) yang hanya dengan APBD Rp. 2,8 T. Hal ini memberi kita satu kesimpulan bahwa untuk tahun 2020 Pemprov Riau mempunyai tugas sangat besar dalam mengelola keuangan daerah agar pertumbuhan ekonomi Riau kembali bangkit. Dalam pandangan kami, terealisasinya proyek-proyek fisik pemerintah terutama infrastruktur akan meningkatkan distribusi uang tunai di masyarakat, baik dalam transaksi pengadaan barang maupun upah pekerja. Ini akan berimbas pada meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian akan terus bergerak di lapis bawah. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor konsumsi rumah tangga secara umum dapat mendominasi dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Harapan kami ke depan pemerintah lebih memperkuat belanja yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan. Disamping itu upaya peningkatan PAD dari sumber-sumber bukan pajak perlu lebih ditingkatkan seperti optimalisasi kinerja 6 BUMD yang mengelola dana pemerintah sehingga mampu memberikan sharing profit lebih signifikan kepada pemerintah daerah. Dalam hemat kami, agar APBD Riau 2020 bisa lebih baik, maka Pemerintah Provinsi Riau perlu dukungan birokrasi yang cerdas dalam kebijakan, berani dalam merealisasikan anggaran, sekaligus bersih dari perilaku korupsi.

Kedua, dalam perspektif dunia usaha di Riau kami melihat saat ini persoalan dua sektor unggulan selama ini yaitu perkebunan terutama kelapa sawit dan migas masih pada posisi belum menguat seutuhnya. Kinerja pelaku industri kedua sektor ini masih terus stagnan yang sangat besar disebabkan efek *global market*. Kuatnya hambatan tarif/ non tarif terhadap ekspor CPO terutama dari Eropa menjadi sebab tertahannya pertumbuhan industri pengolahan. Sementara dua negara yaitu India dan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor CPO di Asia sampai saat ini belum menunjukkan akan meningkatkan permintaan bahkan cenderung melemah. Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan bahwa kinerja ekspor CPO dari Januari – September 2019 tercatat turun 1,75% dibanding tahun lalu. Per September 2019 volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India mengalami penurunan 38%. Sementara volume produksi CPO nasional terus meningkat, hal ini berakibat inventori minyak sawit di Indonesia terus menggunung. Situasi gejolak harga CPO dunia yang berimbas pada rendahnya nilai tandan buah segar (TBS) di masyarakat telah berlangsung dalam rentang waktu kurang lebih 4 tahun. Artinya pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Riau perlu resolusi dalam penanganan masalah CPO ini mengingat Riau memiliki kebun kelapa sawit lebih dari 2 juta hektar. APINDO sangat mendukung upaya pemerintah dalam strategi penyelesaian masalah ini seperti pengembangan industri biodiesel, pengembangan kawasan industri hilir minyak sawit, meringankan regulasi (tax allowance, tax holiday, dan bea masuk untuk mesin industri dipangkas). Di Riau telah ditetapkan kilang minyak Dumai yang dikonversi menjadi industri hilir minyak sawit untuk menghasilkan biodiesel sebagai jalan keluar kemelut industri CPO. Pada 2019 lalu PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai telah berhasil memproduksi green solar dengan komposisi 87,5% minyak bumi dan 12,5% minyak sawit. Kami berharap dalam hal ini Pemprov Riau bisa memberi perhatian lebih besar agar penggunaan minyak sawit untuk industri green solar tersebut bisa lebih besar mencapai 20 – 30%. Selanjutnya berharap pada terus berkembangnya program biofuel tersebut, kami berfikir bahwa sudah seharusnya pula Riau secara mandiri berupaya untuk membangun industri refinery minyak sawit sebagai industri antara untuk menghasilkan produk turunan *oleofood, oleochemical, dan biodiesel*. Mengutip pandangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bahwa industri pengolahan minyak sawit semakin hilir maka nilai tambahnya akan semakin besar, sebagai contoh margarin memiliki nilai tambah 48% dari harga CPO, surfaktan memiliki nilai tambah 366 %, dan yang paling hilir kosmetik memiliki nilai tambah 522%. Secara nasional kita baru mampu menghasilkan 20 jenis produk turunan minyak sawit, sedangkan Malaysia sudah 147 turunan. Gambaran ini memberikan kita satu pemikiran lebih baik bahwa industri CPO masih mempunyai harapan besar dengan exit strategi saat ini adalah pengembangan industri hilir. Terkait hal ini APINDO Riau siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi agar mimpi ini dapat diwujudkan bersama.

Ketiga, dalam perspektif Blok Rokan sebagai potensial capital untuk membangun ekonomi dan SDM unggul Riau. Satu kekayaan asli Riau dengan potensi sebagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah memperkirakan bahwa cadangan terbukti Blok Rokan mencapai 500 juta barel hingga 1,5 miliar barel minyak. Kekayaan alam Riau yang selama lebih dari 50 tahun di eksplorasi dan dieksploitasi PT. Caltex Pacific Indonesia dan kemudian menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia, kini telah diputuskan akan dikuasai oleh perusahaan dalam negeri PT. Pertamina (Tbk) per tanggal 8 Agustus 2021. Ini patut kita syukuri dan banggakan untuk kedepan menjadi sebuah harapan kekuatan meningkatkan ekonomi daerah dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Riau. Atas pengambilalihan Blok Rokan, pemerintah telah memberikan *Participating Interest* (PI) kepada Riau sebesar 10% tanpa penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Permen ESDM RI No. 37 Tahun 2016. Kita sebagai jati anak negri tidak melihat angka 10% ini sebagai sesuatu yang fantastis walau tanpa penyertaan modal, karena sesungguhnya Riau telah menyertakan modal dengan asset alamnya yang sangat besar berupa minyak bumi. Blok Rokan telah menyumbangkan lebih dari 2 miliar barel dalam industri minyak nasional yang tentunya memberikan nilai devisa sangat besar bagi negara. Maka sudah sepatutnya Riau kini menikmati kemanfaatan yang lebih besar untuk kemajuan daerah dari kekayaan minyaknya sendiri. Kita perlu optimalisasi lebih baik dalam hal kepemilikan dan pengeloaan Blok Rokan ini agar seluruh rantai nilai (*value chain*) produksi migas melibatkan dan memberi dampak pada pertumbuhan pelaku usaha lokal serta masyarakat Riau secara luas melalui ketenagakerjaan maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Maka untuk itu Pemerintah Provinsi Riau dan segenap elemen masyarakat Riau perlu dan berhak mendapatkan transparansi data, audit dan apraisal fasilitas pengelolaan migas Blok Rokan yang ada selama ini. APINDO Riau pada khususnya sudah mempersiapkan diri untuk terlibat hal ini dalam kepentingannya memberdayakan para pengusaha lokal agar diberi ruang untuk mengambil bagian dalam eksplorasi Blok Rokan ke depan.

Keempat, dalam perspektif pengembangan infrastruktur Jalan Tol di Riau sebagai sarana percepatan dan efisiensi transportasi. Dalam kerangka berfikir moderat kami menilai Riau memang pantas mendapatkan fasilitas ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lintas wilayah antar Kabupaten/ Kota yang relatif cukup jauh bisa diperpendek waktu tempuh dengan adanya jalan tol. Dari sisi dunia usaha secara waktu ada nilai efisiensi yang mungkin pula akan berdampak pada nilai efisiensi biaya transportasi barang atau jasa. Namun demikian dalam sudut pandang untuk menjaga efek samping tol sebagai jalan lintas cepat yang menghubungkan beberapa wilayah, maka kami melihat perlu

satu pemikiran lebih lanjut tentang kawasan-kawasan lintas tol. Seperti jarak Pekanbaru – Dumai yang selama ini ditempuh dalam waktu 5 – 6 jam, kedepan dengan adanya jalan tol akan bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Artinya dalam waktu 5 – 6 jam selama ini, beberapa lintas kawasan telah menjadi titik perhentian (*rest area*) yang secara aktual membawa dampak ekonomi. Mungkin tidak berlebihan jika ini menjadi kekhawatiran bagi kami dengan adanya tol dapat diprediksi wilayah dimana titik-titik perhentian tersebut berada akan mengalami kemunduran secara ekonomi. Ini perlu menjadi perhatian dan pemikiran berbagai pihak agar daerah-daerah lintasan tol seyogyanya harus tetap dapat tumbuh dan berkembang. Lebih lanjut bahwa pemerintah juga harus mempersiapkan regulasi sebagai impact dari adanya tol yaitu urbanisasi penduduk. Jarak yang semakin pendek dan waktu tempuh yang semakin singkat akan memudahkan penduduk dari satu kawasan bermigrasi ke kawasan lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dari sisi kami APINDO yang dipercaya untuk mengawal kenaikan pengupahan, maka saat ini Dumai telah menjadi Kota yang memiliki UMK tertinggi di Riau, yaitu Rp. 3.383.834,29. Maka bukan tidak mungkin ini menjadi magnet bagi para pencari kerja untuk bermigrasi ke Dumai mencari upah yang maksimal. Belum lagi nanti jika jalan tol Pekanbaru – Padang beroperasi yang akan semakin memperpendek jarak tempuh yang sebelumnya 6 jam menjadi 2 jam. Potensi migrasi antar provinsi, bukan hanya penduduk tetapi juga kendaraan juga akan semakin tinggi. Maka dalam pendapat kami, tol sebagai sarana infrastruktur sudah menjadi agenda mandatory pemerintah saat ini sebagai agenda nasional, namun pemerintah daerah perlu berbenah karena tol juga akan membawa dampak secara sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat salah satunya para pelaku UKM.

Kelima, Pengembangan kawasan industri kreatif dengan dukungan digital marketing. Saat ini di Riau terdapat ratusan atau mungkin ribuan para pelaku industri kreatif. Namun sejauh ini mereka tumbuh secara mandiri dan tidak mendapat dukungan penuh dalam pengembangan usaha terutama dalam aspek marketing. Padahal sesungguhnya industri kreatif merupakan isu strategis nasional dan salah satu sektor ekonomi produktif yang telah berkontribusi dalam menopang ekonomi masyarakat dan umumnya pada klaster UKM. Mereka mampu bertahan ditengah lesunya ekonomi karena ditopang kecintaan berkreasi para pelakunya, bahkan diantaranya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Industri yang bersifat spesifik dan mengandalkan kreatifitas ini memiliki segmentasi pasarnya masing-masing dan sesungguhnya mereka mampu menciptakan brand lokal Riau yang bisa dikenang oleh para pendatang. Hanya saja sejauh ini beberapa industri kreatif yang mencoba menumbuhkan konsep brand lokal belum mampu bersaing dengan serbuan produk luar yang masuk ke Riau. Artinya mereka untuk tetap eksis dan tumbuh memerlukan dukungan pemerintah sehingga mampu berkontribusi terhadap PDB. Salah satu langkah strategis untuk

ini yaitu dengan mengembangkan kawasan khusus ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi digital sebagai value chain terutama di era 4.0 saat ini. Hal ini penting untuk mempercepat kekuatan promosi sebagai ekspansi pasar yang lebih luas dan untuk menekan biaya transaksi. Dengan demikian harga produk dapat lebih bersaing dipasaran. APINDO Riau siap mendukung upaya ini dengan mensinergikan para pelaku industri kreatif ini dengan para pelaku usaha besar sehingga terjalin kemitraan saling menguntungkan.

Keenam, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tahun 2019 lalu, masyarakat Riau kembali harus menghirup asap dari kebakaran hutan dan lahan yang relatif paling parah dalam 3 tahun terakhir. Tingkat cemaran udara sudah sampai berbahaya dan sejumlah instansi pemerintah serta organisasi masyarakat berlomba-lomba membuat rumah singgah untuk menyelamatkan warga yang tidak mampu bertahan dengan asap. Aktivitas penerbangan terganggu, pendidikan sempat lumpuh selama kurang lebih 2 pekan lamanya, dan rumah sakit dipenuhi pasien ISPA. Satgas Karhutla pemerintah dibantu tim pemadam dari perusahaan-perusahaan berlaga memadamkan api di lahan terbakar, water booming dilakukan, dan teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan) diupayakan untuk memadamkan titik-titik api. Polisi telah menangkap ratusan orang sebagai tersangka pelaku pembakaran lahan dan beberapa dari perusahaan. Pada akhirnya dilaporkan angka Rp. 468 milyar adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memadamkan api karhutla. Bank Indonesia melaporkan dalam pendekatan ekonometrik karhutla berdampak negatif 0,24% terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Polisi menyebut motif pelaku melakukan pembakaran lahan lebih kepada aspek ekonomi. Terkait karhutla ini kami dari dunia usaha ingin memberi satu pandangan bahwa pada prinsipnya perulangan kasus kebakaran lahan ini seperti agenda tahunan yang berulang pada musim panas. Artinya, kami melihat bahwa kasus ini dapat diminimalisir tidak cukup hanya dengan penegakan hukum dan penyadaran masyarakat. Namun dalam pandangan kami pendekatan pada aspek penguatan ekonomi masyarakat justru menjadi titik strategis agar aktivitas pembakaran lahan bisa diminimalisir. Perlu satu rencana komprehensif dan sinergis antar lembaga baik dari sisi penegakan hukum, penguatan kelembagaan sosial, pemberdayaan ekonomi, pembinaan keagamaan, dan penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan di lembaga pendidikan untuk mencegah karhutla terulang kembali. Kami dari dunia usaha siap bermitra dan menjadi bagian dalam perencanaan maupun implementasi upaya-upaya komprehensif tersebut agar jangan lagi kabut asap berulang di negeri ini tahun depan.

Inilah 6 sudut pandang kami dari sisi tugas dan tanggung jawab untuk membangun dunia usaha daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Sebagai wakil dunia usaha Riau, kami juga meminta pemerintah agar lebih

memperhatikan dunia usaha Riau yang saat ini masih harus mengikuti puluhan perizinan, 16 pajak daerah, dan berbagai retribusi. Namun kami juga bersyukur dari hasil kegiatan Survey Daya Saing Usaha (SDSU) yang APINDO Riau gelar bersama National University of Singapura (NUS) memberi kita Riau pada posisi 10 peringkat Indeks Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja. Harapan kami hal ini kedepan bisa lebih kita tingkatkan bersama menjadi lebih baik untuk memperkuat dunia usaha dan investasi di Riau. Pandangan yang kami elaborasi di atas kiranya bisa jadi sumbangan pemikiran kami APINDO Riau sebagai bahan diskusi bersama untuk kemajuan Riau.

Begitu banyak tugas yang harus difikirkan dan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada 2020. Tantangan ke depan masih akan sangat berat bila dihubungkan dengan iklim ekonomi global yang mempengaruhi iklim ekonomi nasional. Meski tekanan dunia luar semakin besar, namun harapan selalu ada. Kami dari APINDO Riau selalu memandang optimis bahwa pekerjaan rumah yang besar di atas akan dapat kita selesaikan bila dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif. Seluruh komponen harus menjadi satu sistem dalam fungsi tugasnya masing-masing. Untuk itu kita bersama sangat menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Gubernur Riau, Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si beserta Wakil Gubernur Bapak H. Edi Natar Nasution, S.IP dalam inovasi menuju Riau cemerlang, Riau terbilang.

Akhirnya, kami DPP APINDO Riau berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk tetap menjadikan APINDO sebagai salah satu stakeholder strategis untuk bersinergi dalam pembangunan iklim investasi dan mendorong kemajuan dunia usaha Riau. Semoga pada tahun 2020 ini, Riau mampu bangkit dan tumbuh menjadi Provinsi terbaik di Indonesia.

PELAKSANAAN KEGIATAN

APINDO Riau sampai dengan berakhirnya tahun 2019 tetap bergerak produktif sesuai koridor dan menuju visi Membangun Iklim Dunia Usaha Riau Kondusif dan Kompetitif. Perjalanan DPP APINDO Riau dalam mewujudkan visi tersebut telah menjadi catatan-catatan yang kami dokumentasikan sebagai bukti kepada seluruh stakeholders kami yang kami tuangkan dalam buku laporan ini. Keberagaman aktifitas kami laksanakan bersama seluruh stakeholder di Riau baik pemerintah provinsi, perusahaan-perusahaan, media, maupun dunia kampus. Ini menjadi satu kenyataan bahwa APINDO Riau telah mendapat tempat diberbagai kalangan pemangku kepentingan Bumi Lancang Kuning.

Selanjutnya dalam laporan ini kami sampaikan rekapitulasi kegiatan-kegiatan DPP APINDO Riau pada tahun 2019 lalu yang kami bagi menjadi 5 kelompok kegiatan kerja berupa aktifitas internal, yaitu kegiatan DPP dalam hubungannya dengan DPK, members, mitra , maupun penerbitan dokumen. Berikut rekapitulasi kegiatan :

	AKTIFITAS	JUMLAH
A	Aktifitas Internal	
	1. Konsolidasi DPK	5 Kali
	2. Menghadiri Acara DPK	2 Kali
	3. Pertemuan dengan members/stakeholders	3 Kali
	4. Fasilitator Perundingan	3 Kali
	5. Penerbitan Dokumen	5 Kali
B	Aktifitas Kerjasama Antar Institusi	
	1. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah	1 Kali
	2. Kerjasama dengan Institusi lain	3 Kali
C	Aktifitas Partisipan Kegiatan	
	1. Tingkat Lokal (Provinsi)	55 Kali
	2. Tingkat Nasional	4 Kali
	3. Tingkat Regional	1 Kali
D	Aktifitas Sebagai Narasumber	7 Kali
E	Aktifitas Anggota Tim Kerja	6 Kegiatan

Berikut laporan selengkapnya seluruh kegiatan yang terbagi kedalam 5 (lima) kelompok sebagaimana tersebut di atas.

1. AKTIFITAS INTERNAL

h. Konsolidasi dengan DPK

Kegiatan konsolidasi antara DPP dengan DPK dalam berbagai hal masih berjalan dan bersifat insidental terkait masalah-masalah aktual yang berkembang dan dihadapi. Kegiatan pertemuan konsolidasi yang dapat kami laporkan, adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan DPK Bengkalis terkait UMK tahun 2020 pada tanggal 8 November 2019 di Pekanbaru dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
2. Pertemuan dengan DPK Dumai terkait UMK Dumai tahun 2020 pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.
3. Pertemuan dengan seluruh DPK dalam agenda Rakerkonprov APINDO Riau pada tanggal 1 November 2019 di Pekanbaru di Hotel Furaya Pekanbaru.
4. Pertemuan dengan DPK Siak terkait PAW Ketua DPK Siak pada tanggal 23 November 2019 di Sekretariat DPP APINDO Riau Hotel Furaya Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.
5. Pertemuan dengan DPK Indragiri Hulu tentang aturan penerbitan Sertifikat Tanda Anggota (STA) pada tanggal 16 Desember 2019 di Sekretariat DPP APINDO Riau Hotel Furaya Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki.

b. Menghadiri Acara DPK

Beberapa kegiatan menghadiri kegiatan DPK yaitu,

1. Pembukaan Pelatihan Asesor Kompetensi oleh DPK Pekanbaru bekerjasama dengan BNSP, LSP, dan Forum Riau Cerdas yang dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi di Hotel PrimePark Pekanbaru pada tanggal 19 November 2019.



2. Pada tanggal 27 Desember 2019, DPP APINDO Riau diwakili oleh Bendahara DPP R. Elwan Jumandri menghadiri Musyawarah Kabupaten DPK Pelalawan sebagai syarat untuk keabsahan kegiatan Muskab. Dalam forum ini telah terpilih Sdr, Jufri sebagai Ketua DPK APINDO Pelalawan defenitif. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam APINDO Kabupaten Pelalawan.



c. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov)

Dipenghujung tahun lalu tepatnya tanggal 1 November 2019, DPP APINDO Riau melaksanakan satu agenda penting organisasi yaitu Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI (Purn). H. Edi Natar Nasution, SIP dan dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan pemerintah provinsi, mitra kerja DPP APINDO Riau, dan kepengurusan DPP serta DPK APINDO Riau. Agenda ini menjadi sangat penting bagi APINDO Riau untuk membangun sinkronisasi bersama DPK dan anggota agar melangkah ke depan lebih baik. Bersanding dengan terbitnya SE Gubernur tentang keanggotaan APINDO di atas, maka keberadaan APINDO ke depan akan dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dengan itu



akan memberi APINDO ruang gerak yang lebih luas. Namun demikian secara internal APINDO juga harus berbenah agar mekanisme layanan berjalan dengan baik.

Berikut beberapa catatan sebagai rekomendasi Rakerkonprov 2019, yaitu:

1. DPP APINDO Riau dan DPK harus berbenah mempersiapkan diri lebih baik agar fungsi pelayanan keanggotaan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota berjalan dengan baik dan optimal mengingat SE Gubri No. 184/SE/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 telah menjadi dukungan penguatan keanggotaan APINDO.
2. DPP APINDO Riau dan DPK dalam tugasnya dibidang hubungan industrial harus mengawal secara maksimal besaran nilai kenaikan UMP/ UMK dan UMSP dalam azas keberpihakan kepada dunia usaha Riau agar tetap kondusif dan berjalan dengan baik.
3. DPP APINDO Riau dan DPK harus meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan dunia usaha setempat serta pemerintah daerah agar peran APINDO semakin kuat sebagai wakil dunia usaha dan mendapat perhatian yang baik dari seluruh stakeholder daerah.
4. DPP APINDO Riau dan DPK harus bersinergi dalam menjaga iklim dunia usaha untuk tetap kondusif dengan mencermati dan menyikapi keluhan dunia usaha terutama atas regulasi-regulasi pemerintah (perizinan, pajak daerah, retribusi, dan lainnya) yang bersifat memberatkan pelaku usaha.
5. DPK APINDO setiap Kabupaten/ Kota agar mempunyai program unggulan strategis sebagai kontribusi mendukung pertumbuhan pengusaha lokal seperti pemberdayaan UMKM, program pelatihan sertifikasi kepada dunia usaha, dan lainnya sesuai kajian bersama pengurus DPK setempat.

Inilah 5 point penting yang menjadi rekomendasi Rakerkonprov 2019 APINDO Riau untuk dilaksanakan bersama dalam membangun iklim dunia usaha Riau yang lebih kondusif dan kompetitif.

d. Pertemuan-pertemuan dengan Members/ Stakeholder

Aktivitas pertemuan dengan members menjadi satu agenda penting dalam hal meningkatkan komunikasi dan penyelesaian masalah-masalah aktual

dunia usaha di Riau. Pertemuan ini menjadi penguat hubungan kemitraan antara DPP APINDO dengan members. Disamping pertemuan-pertemuan informal, DPP APINDO Riau juga menggelar pertemuan secara formal dengan para members yang sudah dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu :

1. Pertemuan APINDO dengan Perusahaan Jasa Penunjang Migas Riau di Hotel Premiere pada tanggal 11 Januari 2019 pembahasan tentang UMSP Sektor Migas tahun 2019.



2. Acara Buka Puasa Bersama DPP APINDO Riau dan BPJS Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh Asisten I Gubernur Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Disnakertrans Provinsi Riau, members, dan DPK APINDO bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2019.



3. Pertemuan dengan pejabat baru Deputy Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Bp. Pepen S Almas di Hotel dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPP APINDO Riau di Hotel Premiere tanggal 18 Desember 2019.



e. Menyikapi Regulasi

Terkait regulasi, pada tahun 2019 lalu DPP APINDO Riau telah merespon 2 hal, yaitu:

1. Adanya kenaikan tarif Pajak Air Permukaan (PAP) yang dilaporkan perusahaan industri pulp dan kertas di Riau, bahwa pada prinsipnya

kedua perusahaan tersebut menyampaikan keberatan atas kebijakan kenaikan Pajak Air Permukaan (PAP). Menyikapi pengaduan ini, DPP APINDO Riau meneruskan perihal kenaikan PAP ini ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Jakarta. Melalui DPN APINDO perihal keberatan ini disampaikan ke Kementerian PUPR RI untuk dievaluasi karena memberatkan dunia usaha. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2019 Kementerian PUPR RI melakukan uji publik Harga dasar Air Permukaan dengan sejumlah pelaku usaha. Hasilnya sampai dengan Desember 2019 sementara masih dalam kajian ulang Kementerian PUPR RI.

2. Pengajuan surat pelaksanaan Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dimana pada lampiran V Kepmenaker tersebut perusahaan harus mencantumkan nomor keanggotaan APINDO. Surat ditujukan kepada Gubernur Riau meminta agar perusahaan yang mengurus Peraturan Perusahaan (PP) dan Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke instansi terkait harus memiliki nomor keanggotaan APINDO Riau. Surat ini kemudian direspon oleh Gubernur Riau dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 184/SE/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Keanggotaan APINDO Provinsi Riau yang mengatur agar Dinas Ketenagakerjaan baik tingkat Provinsi maupun Kab./Kota untuk memperhatikan pengurusan PP dan PKB dengan mensyaratkan pengisian nomor keanggotaan APINDO dan melampirkan copy KTA APINDO Riau. Surat ini kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. 560/Disnakertrans-HK/2759 tertanggal 4 November 2019 tentang penyampaian SE Gubernur Riau No. 184/SE/2019 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab./Kota se-Riau yang meminta kepada instansi terkait menyampaikan kepada perusahaan tentang pencantuman nomor keanggotaan APINDO pada pengurusan pengesahan PP dan PKB.

f. Fasilitator Perundingan

Sebagai wakil dunia usaha Riau dan salah satunya dalam proses perundingan penetapan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Migas yang menjadi dimensi kerja APINDO Riau, maka pada tahun 2019, DPP APINDO Riau kembali memfasilitasi dan melaksanakan perundingan UMSP Migas dengan 6 Serikat Buruh/ Serikat Pekerja (SB/SP) di Riau untuk penetapan UMSP Migas 2019 dan UMSP Migas 2020.

Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan perundingan UMSP Migas yang pada tahun 2019 dilaksanakan 2 kali yaitu perundingan penetapan UMSP Migas tahun 2019 dan perundingan penetapan UMSP Migas tahun 2020.

- UMSP Migas 2019

1. *Perundingan ke-1* pada tanggal 7 Desember 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru, materi bahasan penetapan Tata Tertib Perundingan.
2. *Perundingan ke-2* pada tanggal 26 Februari 2019 di Hotel Furaya Pekanbaru, dengar pendapat usulan besaran kenaikan UMSP Migas dari SB/ SP dan APINDO Riau dimana SB/SP mengusulkan besaran kenaikan sebesar 13% dan APINDO Riau mengusulkan 1,5%.
3. *Perundingan ke-3* pada tanggal 19 Maret 2019 di Hotel Furaya Pekanbaru yang merupakan perundingan final penetapan kesepakatan kenaikan UMSP 2019 sebesar 3%.



- UMSP Migas 2020

Perundingan ke-1 pada tanggal 13 Desember 2019 di Hotel Furaya Pekanbaru, dengan materi bahasan penetapan Tata Tertib Perundingan. Perundingan selanjutnya disepakati bersama dengan 6 SP/SB yang diundang dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

g. Penerbitan Dokumen

Selama tahun 2019 lalu DPP APINDO Riau telah menerbitkan beberapa dokumen Surat Keputusan (SK) yaitu:

1. Surat Keputusan (SK) No. 067/KEP-DPP/APINDO/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sekretariat DPP APINDO Riau.
2. Surat Keputusan (SK) No. 093/KEP-DPP/APINDO/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pembentukan Tim Caretaker DPK APINDO Kab. Kepulauan Meranti.
3. Surat Keputusan (SK) No. 102/KEP-DPP/APINDO/XI/2019 tanggal 23 November 2019 tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu (PAW) DPK APINDO Kab. Siak masa bakti 2016 – 2021.
4. Surat Keputusan (SK) No. 103/KEP-DPP/APINDO/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Biaya Pendaftaran Keanggotaan APINDO Riau.

5. Peraturan Organisasi (PO) No. 105/PO-DPP/APINDO/XI/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Peraturan Penerbitan Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO dan Iuran Keanggotaan.
6. Surat Keputusan (SK) No. 110/KEP-DPP/APINDO/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Pelalawan Masa Bakti 2019 – 2024.

2. AKTIFITAS PROGRAM KEMITRAAN

Kegiatan kemitraan sinergi DPP APINDO dengan pihak lain yang sudah dilaksanakan yaitu :

1. Kemitraan dengan PT. Karya Teknik Perkasa Jakarta dalam sosialisasi Permen LHK No. 93/2018 (tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah) dan presentasi pemantauan limbah sistem Sparing dengan narasumber Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera - P3ES , dan PT. Karya Teknik Perkasa di Hotel Furaya pada tanggal 22 Februari 2019



2. Kemitraan dengan Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kwan Yeow Scholl Singapura dalam Survey Tingkat Daya Saing Usaha 2019 Prov. Riau di Hotel Furaya Pekanbaru tanggal 24 Mei 2019.



3. Kemitraan dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru dalam kegiatan Diskusi Publik, tema “Polemik Implementasi Denda 2% (dua persen) berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat 4 UU KUP 2009” di SKA Co-EX Pekanbaru pada tanggal 24 September 2019.



4. Kemitraan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Riau dalam acara Sosialisasi **Road to Go Public Business Meeting** dengan thema “Strategi Menuju Akselerasi Pertumbuhan Perusahaan yang Optimal Melalui Pasar Modal Indonesia”, di Hotel Furaya tanggal 21 Agustus 2019.



3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN

Sebagaimana tahun sebelumnya, selama periode tahun 2019 DPP APINDO Riau tetap aktif menghadiri berbagai event kegiatan baik tingkat lokal, nasional, maupun regional berdasarkan undangan-undangan yang kami terima melalui Sekretariat. Kami berkomitmen untuk semaksimal mungkin agar seluruh undangan yang diterima dapat dihadiri karena ini penting untuk memperkuat hubungan silaturahmi dan hubungan kerja. Namun demikian beberapa agenda undangan tidak dapat dihadiri mengingat waktu dan kesempatan dari pengurus untuk memenuhi undangan dimaksud terutama yang ke luar daerah. Kami berharap pada tahun 2020 kami bisa lebih baik dan lebih aktif menghadiri undangan-undangan kegiatan yang sampai kepada kami baik di dalam Provinsi Riau maupun undangan di luar provinsi.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dihadiri DPP APINDO Riau sebagai peserta/partisipan yang terbagi kepada tingkat lokal/ daerah, nasional, dan regional.

A. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah

JANUARI

1. Acara HUT Satpam ke 38 tahun 2019 Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2019 di Kantor Walikota Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi, dan Ketua DPK Kota Pekanbaru, Fahrial



2. Upacara Bulan K3 Nasional tahun 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 di Halaman Kantor Gubernur Riau yang dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri dan Wakil Sekretaris DPP APINDO Riau, Zulfikar.



3. Diseminasi Analisis Gender di Riau oleh Bappeda, UNDP, & Tanoto Foundation pada tanggal 17 Januari 2019 di hotel Premiere yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



4. Bedah APBD Riau tahun 2019 oleh ISEI Pekanbaru di Gedung A Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 22 Januari 2019 yang dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.



FEBRUARI

5. Coffee Morning dari Kadin Riau tentang Pembangunan Gas Plant pada tanggal 13 Februari 2019 di Kantor Kadin Riau yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPP APINDO Riau Bukhari, dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki.



6. Peresmian kantor Jamkrindo Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2019 yang dihadiri Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki.



7. Syukuran Gubernur Riau yang baru Bp. Drs. H. Syamsuar, M.Si pada tanggal 21 Februari 2019 di kediaman Gubernur Riau yang dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko dan Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



8. Rakerprov Intakindo Riau pada tanggal 28 Februari 2019 di Hotel Premiere yang dihadiri Wakil Ketua DPP APINDO Riau, Bukhari



MARET

9. Undangan Rakerwil KSBSI di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2019 dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno



10. Undangan Malam Seni Budaya dan Jamuan Makan Malam Gubernur dengan Seluruh Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur dan Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Maret 2019 di Gedung Daerah dihadiri Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



11. Sebagai utusan anggota Dewan Juri Lomba Bisnis Plan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Sarif Kasim Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2019 yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPP APINDO Riau, Makmur Kasim



12. Serah terima Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Wilayah Bank Indonesia dihadiri oleh



APRIL

13. FGD Tantangan Investasi Kota Pekanbaru di era industrialisasi 4.0 menuju 2020 di Hotel Grand Central pada tanggal 16 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



14. Pembukaan Pameran Bursa Kerja (Riau Job Fair) tahun 2019 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru Pada tanggal 24 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau, Arpi Marzuki



15. Sosialisasi penjaminan kredit konstruksi, Bank Garansi dan Surety Bond dari Jamkrindo Riau di Hotel Grand Central, tanggal 25 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi dan Sektif DPP Arpi Marzuki



16. Rapat Anggota LKS Tripartit Riau di kantor Disnakertrans Riau pada tanggal 29 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi



17. Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Riau Periode 2019 di Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 30 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi



MEI

32. Rapat Isu Strategis Peningkatan Produktivitas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau pada tanggal 16 Mei 2019 di Fox Harris Hotel dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



JUNI

33. Temu Ramah dan Kunjungan Kerja Dewan Pengupahan DKI Jakarta ke Dewan Pengupahan Provinsi Riau dan Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru di Kantor Disnakertrans Riau pada tanggal 20 Juni 2019 dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau, Elwan Jumandri



JULI

34. Forum Stakeholders Advisory Committee (SAC) APRIL di Hotel Premiere pada tanggal 9 Juli 2019 di Hotel Premiere dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



35. Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Periode Mei 2019 di Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 10 Juli 2019 dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



36. Coffee Morning KADIN Riau tentang Sosialisasi Modal Kerja Era Digital (Fintech) oleh Danamart (PT. Dana Aguna Nusantara) di Aula Kadin Riau pada tanggal 23 Juli 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



37. Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Hotel Furaya pada tanggal 24 – 26 Juli 2019 dihadiri oleh Wakil Sekretaris DPP APINDO Riau, Agus Setiawan.



38. Sosialisasi Paritrana Riau pada tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Labersa Pekanbaru dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri.



AGUSTUS

39. Penyerahan Penghargaan K3 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 di Hotel Grand Suka Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2019 dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri



SEPTEMBER

40. Pembukaan Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, tanggal 19 September 2019 di Hotel Pesonna Pekanbaru dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPP APINDO Riau



OKTOBER

41. Peringatan Hari Koperasi pada tanggal 3 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



42. Diseminasi Laporan Perekonomian Riau Edisi Agustus 2019 di Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 10 Oktober 2019 dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno, Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Ketua Bidang Wanita Pengusaha & UKM, Tifany



43. Coffee Morning dan Job fair Forum HRD bersama Politeknik LP3I Bandung Kelas D2 Pekanbaru di Central Plaza Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2019 dihadiri Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



44. Misi Promosi Malaysia (Malaysia Roadshow) oleh Duta Besar Malaysia di Grand Jatra Pekanbaru pada 25 Oktober 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi

45. CEO Roundtable “Pelatihan Tingkat Daerah Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menanamkan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di dalam Perusahaan” di Hotel Premiere Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2019 dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



NOVEMBER

46. Rapat dan Sosialisasi PARITRANA tingkat Provinsi tahun 2019 di Hotel Premiere pada tanggal 1 November 2019 dihadiri Bendahara DPP APINDO Riau, R. Elwan Jumandri



47. Pertemuan Komite Advokasi Daerah (KAD) Riau dalam acara Diseminasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha di Balai Serindit Gedung Daerah pada tanggal 12 November 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



48. Pelantikan Pengurus Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) di Hotel Premiere Pekanbaru pada tanggal 19 November 2019 dihadiri Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki



49. Pembukaan Pelatihan Asesor Kompetensi di Prime Park Pekanbaru pada tanggal 19 November 2019 dihadiri Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi



50. FGD dengan Komisi XI DPR RI dan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau pada tanggal 26 November 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.



51. Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal, Business Intelligence, dan Penghargaan Realisasi Investor Besar tahun 2017 – 2019 untuk Kabupaten / kota oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 27 November 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

52. Farewell Party acara Perpisahan dengan Deputi Direktur BPJS Ketenagakejaan Sumbar-Riau, Budiono di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 29 November 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno



DESEMBER

53. Kuliah Umum tentang Peluang dan Cabaran Industri Halal Era 4.0 bersama Dr. Kamisah Binti Supian (Institut Halal Antar Bangsa – Malaysia) di Auditorium Rektorat Universitas Islam Riau pada tanggal 3 Desember 2019 dihadiri Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki



54. Rapat Pemantapan Kajian Pengembangan Cluster Ubi Kayu di Provinsi Riau tahun 2019 di Ruang Rapat Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Riau Gedung Menara Lancang Kuning Lantai III pada tanggal 11 Desember 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Wakil Ketua DPP, Bukhari



55. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Riau Tahun 2019 di Gedung Bank Indonesia Riau pada tanggal 12 Desember 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arpi Marzuki.



B. Kegiatan Tingkat Nasional

1. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (RAKORKONAS) APINDO tahun 2019 di Batam pada tanggal 1-3 April 2019 dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau.
2. Indonesia Trade Investment Summit 2019 (IT IS 2019) pada tanggal 15 Oktober 2019 di The Ritz Carlton Jakarta dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.
3. Rapat Koordinasi DPN APINDO di NUS Singapura pada tanggal 17 November 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri



4. Pelatihan LEMHANAS RI di Gedung Lemhanas Jakarta pada tanggal 25 November s/d 1 Desember 2019 diikuti oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi dan Ketua DPK Siak, Asril.



C. Kegiatan Tingkat Regional

1. Mengikuti Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura di Singapura pada tanggal 18 s/d 20 November 2019 dihadiri Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno dan Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumandri.



4. SEBAGAI NARASUMBER

Pengurus DPP APINDO Riau selama masa tahun 2019 juga menerima undangan permintaan sebagai narasumber kegiatan, yaitu :

1. Sekretaris Ketua DPP APINDO Riau Edi Darmawi, sebagai pembicara pada Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Pemagangan tahun 2019 di Provinsi Riau bertempat di Hotel Grand Elite Pekanbaru pada tanggal 20 - 22 Maret 2019.
2. Ketua DPP APINDO Riau, Wijatmoko Rah Trisno sebagai narasumber dialog pada Hari Teater Dunia dengan thema “sinergitas dunia usaha dan seni” di Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai) Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2019
3. Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Riau, Peri Akri sebagai narasumber kegiatan pendalaman materi Perancangan Peraturan Daerah di Kantor Kemenkumham Wilayah Riau tanggal 8 April 2019.



4. Ketua Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, dan Pengupahan DPP APINDO Riau, Elfenni Erdianta sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pekerja Perempuan Sehat Produktif diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Hotel Pesonna pada tanggal 24 – 26 April 2019.



5. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno sebagai narasumber Diaog Sosial dengan tema “Together We Grow”, Tumbuh Bersama Antara Pekerja/ Buruh (Serikat Pekerja/Serikat Buruh), Pengusaha dan Pemerintah Kita menjadi Kuat”, dalam rangka Peringatan Hari Buruh 2019, di Hotel Furaya pada tanggal 1 Mei 2019.



6. Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi sebagai narasumber dalam Acara Dialog Khusus Interaktif tentang Ketenagakerjaan di TVRI Riau pada tanggal 22 Mei 2019



7. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno sebagai narasumber dalam acara Dialog mengenai UMP Riau tahun 2020 di TVRI Riau pada tanggal 5 November 2019



8. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno sebagai narasumber dalam Diskusi Panel: Jalan Tol Dorong Pemerataan Ekonomi dan Mengefisienkan Transportasi di Riau yang digelar oleh Koran Bisnis Indonesia di Hotel Pangeran Pekanbaru pada 1 28 November 2019.



5. SEBAGAI ANGGOTA TIM

g. Dewan Pengupahan

DPP APINDO Riau juga merupakan bahagian dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Perihal Dewan Pengupahan ini adalah sebagaimana tertera pada Bab Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengupahan.

h. LKS Tripartit

Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial sebelum meningkat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.16/I/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 dengan Ketua Gubernur Riau dan anggota yang terdiri dari Disnekrtrans Provinsi Riau, Setda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, KADIN Riau, APINDO Riau, DPW SARBUMUSI Riau, SBSI Riau, DPP SBCI Riau, F.SBSI Riau, dan DPD K.SPSI Riau. Dari DPP APINDO Riau telah ditetapkan 4 orang sebagai anggota LKS Tripartit yaitu:

1. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno
2. Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP APINDO Riau, Huiniati
3. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO Riau, Bukhari
4. Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi

i. Pengurus BKSP Riau

Guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan sumber daya manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri di Provinsi Riau, maka telah dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP). Gubernur Riau melalui Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1147/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 yang salah satunya menunjuk Ketua DPP APINDO Riau sebagai Anggota Pengurus BKSP Riau.

j. Tim Juri Anugerah Penghargaan Paritrana 2019 BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau

Penghargaan Paritrana yaitu anugerah penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan melaksanakan dengan baik segala bentuk kewajiban serta melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan atas BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu tim juri penilai penghargaan Paritrana ini yaitu Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumanri.

k. Tim Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024

Tim Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 923/X/2018 dimana Sekretaris

Eksekutif DPP APINDO Riau menjadi anggota tim dalam bidang kelompok kerja ekonomi dan sumberdaya alam.

I. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Permagangan (FKJP) Provinsi Riau

Forum Komunikasi Jejaring Permagangan (FKJP) Riau ditetapkan melalui SK Kadisnakertrans Prov. Riau No. Kpts/ Disnakertrans-PPTK/2017, dimana Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi ditunjuk sebagai Kordinator FKJP Riau periode 2016 – 2019.

KEANGGOTAAN

Keanggotaan merupakan hal yang sangat penting, dan untuk itu kami berupaya untuk menjaga eksistensi anggota yang ada dan menambah anggota baru. Namun demikian situasi pasang surut keanggotaan tidak dapat dihindari mengingat beberapa perusahaan menghentikan kegiatan operasi di Riau terutama perusahaan jasa penunjang migas yang bekerja sebagai subkontraktor di perusahaan KKKS di Riau.

Keanggotaan perusahaan sebagai anggota APINDO di tingkat DPP pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Tercatat jumlah anggota pada tahun 2019 sebanyak 142 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

A. Platinum Members

Platinum Members APINDO Riau yaitu perusahaan-perusahaan swasta nasional yang memberikan investasi tetap bulanan ke DPP APINDO Riau sebesar Rp. 2.000.000 atau lebih. Terdapat 7 perusahaan yang termasuk dalam kategori platinum members ini yaitu :

No.	PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	HOME BASE
1	PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)	Migas	Duri
2	PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP)	Pulp & Paper	Pkl. Kerinci
3	PT. Indah Kiat Pulp And Paper (IKPP)	Pulp & Paper	Perawang
4	PT. Arara Abadi	Kehutanan	Perawang
5	PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN)	Kelapa Sawit	Pekanbaru
6	PT. Bumi Siak Pusako (BSP)	Migas	Pekanbaru
7	PT. Schlumberger	Migas	Pekanbaru

B. Anggota Biasa

Anggota biasa yaitu perusahaan yang tergabung sebagai members DPP APINDO Riau yang berkontribusi memberikan iuran rutin bulanan dibawah nominal iuran Platinum Members. Terdapat 135 perusahaan yang tergabung pada kelompok ini. Data perusahaan anggota terlampir.

TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN

1. DASAR HUKUM DEWAN PENGUPAHAN

Untuk menetapkan nilai upah buruh maka pemerintah telah membentuk Dewan Pengupahan Propinsi Riau yang terdiri dari 29 orang anggota. Dewan Pengupahan ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019. Dewan pengupahan ini diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan keanggotaan terdiri dari :

- Disnakertrans Provinsi Riau
- Biro Hukum Setda Provinsi Riau
- Bappeda Provinsi Riau
- Disperindag Provinsi Riau
- BPS Provinsi Riau
- BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau
- KADIN Provinsi Riau
- APINDO Provinsi Riau
- SPTP – BUN PTPN V
- DPW Sarbumusi Provinsi Riau
- Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Provinsi Riau
- DPP SBCI Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (PD FSP KEP-SPSI) Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PD FSPPP-SPSI) Provinsi Riau
- PW-SBSI Korwil Provinsi Riau

APINDO Riau dalam Dewan Pengupahan ini diwakili oleh 4 orang dari Dewan Pengurus Provinsi:

N A M A	JABATAN
R. Elwan Jumanri, SH., MH	Bendahara
Elfenni Erdianta Br. Bangun, SH, MH	Koord. Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, & Pengupahan
Delveri, SE. Ak	Wakil Sekretaris
Agus Setiawan, SE	Wakil Sekretaris

2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU

Tugas dan tanggung jawab dewan pengupahan Dewan Pengupahan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Upah Minimum Provinsi Riau (UMP)
2. Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)
3. Menerapkan Sistem Pengupahan di tingkat Provinsi

Pada tahun 2019 lalu, Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan tugasnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan berpedoman pada PP No. 78 tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. B-M 308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan telah menghasilkan suatu kesepakatan yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1165/XI/2019 tertanggal 1 November 2019 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2020 yang menerangkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 di Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 2.888.564,01 (*dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol satu sen rupiah*), atau besar kenaikan dari tahun 2017 adalah sebesar 8,51%.

3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR PROVINSI (UMSP) MIGAS

Sesuai amanat PP.78/ 2015 pasal 49 **“Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”**. Terkait amanat PP. 78/ 2015 tersebut maka Disnakertrans Provinsi Riau melalui surat No. 3015/Disnakertrans-HK/2019 tertanggal 26 November 2019 telah memerintahkan DPP APINDO Riau untuk melaksanakan perundingan penetapan UMSP Migas tahun 2020. Oleh karena itu pada TANGGAL 13 Desember 2019 DPP APINDO Riau juga telah mengundang perwakilan perusahaan migas bersama 6 (enam) Serikat Buruh/ Serikat Pekerja untuk pelaksanaan ha tersebut. Disamping sebagai wakil perusahaan migas, DPP APINDO Riau juga menjadi fasilitator pelaksana perundingan penetapan upah minimum sektor migas. Adapun 6 (enam) serikat buruh sektor migas tersebut yaitu:

1. DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Riau
2. Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Provinsi Riau
3. Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Provinsi Riau
4. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau
5. DPW Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Provinsi Riau
6. DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau

Sampai dengan akhir tahun 2019, perundingan belum memutuskan selain Tata Tertib Perundingan. Perundingan selanjutnya di sepakati para pihak dilaksanakan pada bukan Januari 2020.

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA

1. KONDISI DPK SE RIAU

Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota (DPK) APINDO di Provinsi Riau secara umum perlu untuk kami laporkan. Sampai akhir tahun 2019 terdapat 8 DPK yang berstatus defenitif dan 4 DPK masih berstatus caretaker. Berikut data status kepengurusan DPK APINDO se Provinsi Riau :

	Kota/ Kabupaten	Status	Ketua
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	DR. Fahrial, SP, SE, ME, CRBD
2.	Kota Dumai	Defenitif	Ruslan
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	Muhammad Amin
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	Kamaruzzaman
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	Malik
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	Said Yusuf
7.	Kabupaten Bengkalis	Defenitif	Marnalom Hutahaeen
8.	Kabupaten Pelalawan	Defenitif	Jufri
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	Hafith Syukri
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Caretaker	Rasmali
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	Aris Susanto
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	Bastian

2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK

Keberadaan DPK APINDO di setiap Kabupaten/ Kota menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan visi APINDO. Salah satu tugas Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota adalah mengawal pelaksanaan perhitungan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Aktivitas DPK dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota pada tahun 2019 lalu telah berhasil mengawal besar kenaikan upah untuk tahun 2020 secara umum rata sebesar 8,51% pada 12 Kab./ Kota sesuai perhitungan PP. 78 tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. B-M 308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa berdasarkan inflasi nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional maka kenaikan UMP adalah sebesar 8,51%. Nilai UMK ini telah di tetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1198/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau tahun 2020.

Pada 3 Kabupaten/ Kota yaitu Kota Dumai, Kab. Siak, dan kab. Bengkalis pada hasil perundingan awal Dewan Pengupahan Kabupaten menyepakati

besaran kenaikan UMK tidak mengikuti perhitungan sebagaimana Surat Edaran Menaker RI sebesar 8,51%. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menurut data BPS setempat tidak sampai sebesar 8,51 % sebagaimana SE Menaker. Hasil perundingan dewan pengupahan di 3 Kab./Kota tersebut menetapkan sebagai berikut:

- a. Kota Dumai kenaikan UMK sebesar 5%
- b. Kab. Bengkalis kenaikan UMK sebesar 4%
- c. Kab. Siak kenaikan UMK sebesar 6%

Hasil kesepakatan perundingan Dewan Pengupahan masing-masing kabupaten sudah diserahkan ke Bupati/ Walikota masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Riau. Namun Gubernur Riau dengan merujuk SE Menaker RI dan memandang bahwa UMK sebagai bagian Program Strategis Nasional mengirim surat kepada Bupati Siak dan Bupati Bengkalis dengan No. 560/Disnakertrans-HK/2854 tertanggal 12 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Siak/ Bengkalis Tahun 2020 yang meminta agar Sidang Dewan Pengupahan di ulang kembali untuk mendukung Program Strategis Nasional, yang secara prinsip mengikuti nilai kenaikan sesuai SE Menaker RI. Pada selanjutnya Dewan Pengupahan 3 Kab./ Kota tersebut kembali mengadakan perundingan sesuai perintah surat Gubernur Riau. Pada perundingan ulang tersebut Anggota Dewan Pengupahan unsur APINDO menolak dan walkout dari perubahan hasil perundingan pertama yang sudah disepakati sebelumnya menjadi kenaikan 8,51%. Namun demikian Bupati/ Walikota pada ketiga daerah tersebut tetap merekomendasikan ke Gubernur Riau kenaikan UMK sebesar 8,51%.

Berikut daftar kenaikan UMK se Provinsi Riau untuk tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 949/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2019 yang dalam laporan ini kami susun berdasarkan Kab./Kota dengan UMK tertinggi hingga yang paling rendah:

	Kota/ Kabupaten	UMK	%Tase Kenaikan
1.	Kota Dumai	Rp. 3.383.834,29,-	8,51 %
2.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.261.357,42,-	8,51 %
3.	Kabupaten Siak	Rp. 3.048.527,10,-	8,51 %
4.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 3.045.450,87,-	8,51 %
5.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 3.002.383,89,-	8,51 %
6.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.997.971,69,-	8,51 %
7.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.985.193,00,-	8,51 %
8.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.984.696,63,-	8,51 %
9.	Kabupaten Kep. Meranti	Rp. 2.983.926,39,-	8,51 %
10.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.960.855,02,-	8,51 %
11.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.950.088,20,-	8,51 %
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.937.783,42,-	8,51 %

3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK

Berikut kondisi keanggotaan perusahaan di DPK APINDO pada setiap Kabupaten/ Kota per bulan Desember 2018:

	Dewan Pimpinan Kab./ Kota	Status	Jumlah Members
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	22
2.	Kota Dumai	Defenitif	50
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	29
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	10
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	43
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	6
7.	Kabupaten Pelalawan	Defenitif	34
8.	Kabupaten Bengkalis	Defenitif	17
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	-
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Caretaker	-
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	4
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	2
	TOTAL		206

4. KEGIATAN DPK APINDO RIAU

DEWAN PIMPINAN KOTA PEKANBARU



Menghadiri Rapat Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru, dalam rangka Program Survey KHL 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2019.



Menghadiri Pelatihan Pengembangan Produk dan Mekanisme Pasar Modern Online (Blibli.com) dan Sertifikasi Halal pada tanggal 27 Agustus 2019 di IKPP Perawang.



Melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Usaha Menuju Sustainability Development Goals (SDGs) untuk 120 UKM di Riau di Hotel Prime Park Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2019



Penandatanganan MoU antara DPK APINDO Pekanbaru dengan LSP Ritel BNSP Pusat untuk Program Sertifikasi Pelaku Usaha and TUK Riau di Hotel Prime Park Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019



Menghadiri Seminar dan Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKO) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Pekanbaru di Hotel Royal Asnof pada tanggal 17 Oktober 2019.



Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Potensi Investasi dan Produk Unggulan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, tanggal 29 Oktober 2019 di Sultan Resto Jalan Ronggowarsito Pekanbaru.



Menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) DPP APINDO Riau pada tanggal 1 November 2019 di Hotel Furaya Pekanbaru.



Rapat Tripartit Kota Pekanbaru tentang masalah tenaga kerja dan hubungan industrial pada tanggal 14 November 2019 di Ruang Rapat Disnaker Kota Pekanbaru.



Pertemuan dengan DPP APINDO Riau dan Dewan Serat Nasional di D'Star Cafe & Resto Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2019.



Pertemuan bersama Ketua DPP APINDO Riau dengan Presiden BEM Riau. di D'Star Coffee and Resto Pekanbaru pada 27 Desember 2019.

DEWAN PIMPINAN KOTA DUMAI



Menghadiri Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai pada tanggal 26 Juni 2019.



Menghadiri FGD Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Dumai pada tanggal 6 Agustus 2019



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kota Dumai untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Kabupaten Pelalawan pada tanggal 11 November 2019



Menghadiri Pelatihan Digital Marketing untuk Pelaku UMKM Kota Dumai pada tanggal 22 Desember 2019.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PELALAWAN



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pelalawan untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor Bupati Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 November 2019.



Musyawarah Kabupaten II DPK Pelalawan pada tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.



Peresmian dan pembukaan sekretariat DPK APINDO Pelalawan di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 88 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2019

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN BENGKALIS



Rapat persiapan pembahasan pengupahan/ UMK 2020 di hotel Surya Duri – Kab. Bengkalis pada tanggal 14 Agustus 2019.



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Hotel Marina Kab. Bengkalis pada tanggal 29 Oktober 2019.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN SIAK



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Siak untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.



Mengikuti kegiatan LEMHANAS RI di Gedung Lemhanas Jakarta pada tanggal 25 November s/d 1 Desember 2019 diikuti oleh Ketua DPK Siak, Asril.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Menghadiri acara Bimbingan Teknis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Hotel Furaya Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2019 diikuti oleh Wakil Ketua DPK Inhu ,Seno Harto dan Sekretaris DPK Indrahiri Hulu, R. Jon Effendi



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Indragiri Hulu untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor Disnaker Indragiri Hulu pada tanggal 8 November 2019 dihadiri oleh Wakil Ketua DPK Inhu ,Seno Harto dan Sekretaris DPK Indragiri Hulu, R. Jon Effendi.



Menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO di Batam pada tanggal 1 – 3 April 2019 dihadiri oleh Ketua DPK Indragiri Hulu, Malik.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO di Batam pada tanggal 1 – 3 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPK Indragiri Hilir, Suryansah.



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan pada untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor Disnaker Indragiri Hilir pada tanggal 22 Oktober 2019 Batam pada tanggal 1 – 3 April 2019 dihadiri oleh Sekretaris DPK Indragiri Hilir, Suryansah.



Menghadiri Sosialisasi Penyesuaian Iuran JKN-KIS Sesuai Perpres No. 75 Tahun 2019 di Tembilahan pada tanggal 19 November 2019

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor DPMPSTP dan Disnaker Kepulauan Meranti pada tanggal 5 November 2019.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN ROKAN HILIR



Menghadiri Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Rokan Hilir untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor Bupati Rokan Hilir pada tanggal 4 November 2019.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Menghadiri sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk penentuan UMK tahun 2020 bertempat di Kantor DPMTSP dan Tenaga Kerja Kuantan Singingi pada tanggal 6 November 2019.

APINDO TRAINING CENTER

Pada tahun 2019, APINDO Training Center (ATC) Riau masih dalam tahap penyusunan dan sosialisasi program. Sebagai unit kegiatan kerja APINDO Riau, ATC sudah seharusnya menjadi ruang peningkatan kompetensi bagi karyawan perusahaan terutama members. Oleh karena itu, ATC telah menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana kerja ini tentunya kami susun berdasarkan kebutuhan dan usulan dari para members. Harapan kami semua rencana kerja ini dapat dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi ATC telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 di PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang yang dihadiri sejumlah mitra kerja PT. IKPP. Sosialisasi langsung dilakukan oleh Direktur Utama ATC R. Elwan Jumandri. Pada kesempatan itu R. Elwan Jumandri memperkenalkan ATC sebagai pusat kegiatan training APINDO Riau yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas karyawan.



Adapun aktifitas program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Inhouse Training

1. Strategi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan Penyusunan Skala Upah
2. Teknik Negosiasi
3. Industrial Relations Specialist Development Program (IRS DP): Program pelatihan Hubungan Industrial level Specialist.

B. Pelatihan Sertifikasi

1. Sertifikasi HRD
2. Sertifikasi Ahli K3 Umum
3. Sertifikasi Ahli K3 Listrik
4. Sertifikasi Bidang Bisnis Ritel
5. Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut
6. Sertifikasi Auditor Internal SMK 3

Namun untuk lebih meningkatkan peran ATC sebagai sebuah jasa bisnis, maka dewan direksi mengembangkan orientasi ke arah yang lebih luas sebagai berikut:

A. Inspeksi dan Pengujian Program K3, terdiri dari:

- Pesawat Angkat-Angkut (*lifting and Transport Equipment*)
- Pesawat Uap dan Bejana Tekan (*Pressure Vessel and Boiler*)
- Pesawat Tenaga dan Produksi (*Production and Power Equipment*)
- Instalasi Listrik (*Electrical Instalation*)
- Instalasi Proteksi Kebakaran (*Fire Protection Installation*)
- Alat Berat (*Heavy Equipment*)

B. Pengadaan Mesin-mesin Industri

- Metal Processing
- Oil and Gas
- Environmental Technology

C. Jasa Layanan Konsultan

- Environment
- CSR Program
- HR Development

D. Manpower Supply (Security Service)

E. Medical Check-Up

Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif menyesuaikan dengan permintaan para peserta yang berminat.

POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2020

Menjawab tantangan pada tahun 2020 dan permasalahan-permasalahan pada tahun 2019 lalu, maka DPP APINDO Riau telah menyusun langkah-langkah konseptual strategis sebagai upaya penguatan peran dan fungsi organisasi. Beberapa rencana program sebagai resolusi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Layanan Keanggotaan

Program ini merupakan kegiatan lanjutan 2019 yang masih dalam progres pengerjaan, yaitu mengembangkan website DPP APINDO Riau lebih baik dan komunikatif yang juga memuat aplikasi pendaftaran keanggotaan secara online. Diharapkan melalui sistem ini perusahaan yang ingin bergabung sebagai anggota dapat mendaftar lebih mudah dan cepat disamping juga dapat menyampaikan informasi-informasi permasalahan yang dialami perusahaan untuk ditindaklanjuti DPP APINDO Riau.

2. Meningkatkan Program Forum Dialog/ Diskusi melalui Kemitraan

Program dalam bentuk forum dialog fokus berbagai persoalan bisnis, investasi, dan ekonomi daerah dengan kerjasama institusi lainnya, yaitu:

- a. APINDO Business Forum
- b. Members Gathering
- c. Focus Group Discussion

3. Mendefinitifkan DPK

Sampai akhir tahun 2019 masih terdapat 4 DPK yang dalam status caretaker karena belum melaksanakan Musyawarah Kabupaten. Pada tahun sebelumnya kami sudah berusaha untuk mendukung dan memberi arahan agar caretaker DPK dapat melaksanakan musyawarah, namun berbagai kondisi dan kendala masih menghambat mereka untuk bergerak ke arah tersebut. Maka pada tahun ini kami akan mengupayakan agar 4 DPK segera menjadi definitif.

4. Pelaksanaan Musyawarah Provinsi

Mengingat pada tahun 2020 merupakan berakhirnya masa bakti kepengurusan kami saat ini, maka kami berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) sebagai forum pertanggungjawaban 5 tahun dan forum pemilihan kepengurusan selanjutnya.

PENUTUP

Sebuah kata-kata bijak ingin kami kutipkan, *“Masa lalu jadikan pelajaran, masa sekarang jadikan perjuangan, dan masa depan jadikan harapan”*. Inilah sebuah frasa akhir kami menutup 2019. Begitu banyak tugas dan tantangan yang harus dijalani, namun semua kami nikmati dan jadikan bekal menuju tahun 2020. Eksistensi APINDO Riau di Bumi Lancang Kuning tercinta sepanjang 2019 telah tercatat dalam berbagai kegiatan yang kami tuangkan melalui laporan ini.

Perjalanan mengawal dunia usaha Riau untuk tetap kondusif dan kompetitif telah kami perjuangkan semaksimal kemampuan kami. Ada yang berhasil namun ada juga yang belum berhasil kami perjuangkan disebabkan adanya dimensi ruang yang tidak bisa kami lewati. Namun pada akhirnya kami selalu meyakini akan ada perubahan dan perubahan untuk menjadi lebih baik selama kita tetap mau berjuang.

Tahun 2020 adalah masa akhir periode kepengurusan kami saat ini, melalui laporan ini kami berharap karya-karya yang telah terukir selama ini menjadi estafet untuk dilanjutkan. APINDO Riau telah menjadi bagian dan mewarnai sejarah Provinsi Riau, diterima dan diakui memberikan kontribusi dalam sektor dunia usaha dan ekonomi daerah. Namun pekerjaan rumah masih tersisa untuk harus diselesaikan dan ia akan tetap ada selama negeri ini ada dan berkembang.

Kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kab./Kota di Riau, seluruh members kami, mitra kerja, insan pers, serikat pekerja/ buruh, dan seluruh pengurus yang tidak kami sebut satu persatu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami. Hubungan yang harmonis dan semua dukungan tersebut telah menjadi pendorong serta motivasi yang kuat bagi kami untuk berkarya dalam tugas dan fungsi sebagai perwakilan dunia usaha Riau.



Foto Bersama Setelah Rakerkonprov DPP APINDO Riau di Hotel Furaya Pekanbaru (1/11/2019)

SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) APINDO RIAU



Hotel Furaya Lt. 1, Ruang Akasia – Jl. Jendral Sudirman No. 72 - 74 Pekanbaru 28151 – Riau



0761-8656545



apindo_riau@yahoo.com



apindoriau.or.id